



Suwarti Terpaksa Tidur di Dapur

- Rumah Sempit Berdinding Retak
- 2.195 Rumah Tak Layak Huni di Kota

Untuk mengontrak tak ada uang. Kami syukuri aja bisa hidup di tengah kota meski khawatir kalau rumah rusak

YOGYA, TRIBUN- Sudah puluhan tahun Suwarti sekeluarga yang beristi lima orang menghuni rumah berukuran sekitar 3 X 6 meter persegi di tepi Sungai Code, wilayah Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Rumah kecil itu disekat untuk dua kamar tidur, satu di antaranya seruangan dengan dapur tanpa dinding pemisah. Ditemui Tribun Jogja pekan kemarin, perempuan berusia 40 tahun ini menunjukkan beberapa titik dinding bercat biru dan putih yang sudah mengalami keretakan dan rawan roboh sewaktu-waktu.

● ke halaman 11

Suwarti Terpaksa Tidur

• Sambungan Hal 1

Keterbatasan uang membuat ia dan suaminya terpaksa menggunakan bambu untuk menyangga dinding rumahnya.

"Sudah mulai retak-retak di beberapa bagian tapi kami belum ada uang untuk memperbaiki," ujarnya kepada Tribun Jogja, pekan lalu.

Rumah warga dengan kondisi kurang layak di Kota Yogyakarta hingga saat ini memang masih cukup banyak. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, hingga 2018 ini masih terdapat sekitar 2.195 rumah tak layak huni (RTLH) di wilayah ini.

Pemerintah Kota sudah berupaya merehabilitasi RTLH melalui program yang bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun kriteria RTLH menurut Bappeda di antaranya pencahayaan kurang, lantai yang tidak sehat, dinding non permanen, atap rumah yang juga tidak aman memakai genting tipis, hingga persoalan kebutuhan ruang untuk orang yang tinggal di dalamnya. Disebutkan bahwa sesuai standarnya satu orang harus tinggal di ukuran 8 meter persegi.

Namun, faktanya di Kota Yogyakarta masih banyak rumah kecil yang dihuni banyak orang dan kondisinya bisa dibayangkan kurang layak. Seperti halnya keluarga Suwarti yang berjumlah lima orang, saat ini harus tinggal di rumah 3 X 6 meter.

Tanpa bed

Di rumah yang ditinggali Suwarti bersama tiga anak dan suaminya ini, selain bagian dindingnya harus diperbaiki, karena karena retak, juga terlihat jemuran pakaian menjadi satu di atas langit-langit tempat tidur. Sementara, kelima anggota keluarga ini hanya tidur dengan kasur tanpa bed. Di kamar lainnya, hanya terdapat tikar untuk alas tidur.

Kamar milik Suwarti bah-

kan berdekatan dengan dapur yang juga difungsikan untuk tempat mencuci piring. Kamar dan dapurnya itu bersisih dalam satu ruangan yang sama. Sehingga, beberapa perabotan dapur pun terlihat berserakan di dekat tempat tidur. Untuk menerima tamu pun Suwarti tak ada tempat selain memindahkan kasur dan meminta tamunya duduk lesehan di lantai plester.

Hidup di tengah kota baginya cukup keras, penghasilan tak menentu dari suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan hanya mampu menutup kebutuhan sehari-hari. Untuk itulah, Suwarti bertahan dalam keterbatasan.

"Untuk mengontrak tak ada uang. Kami syukuri aja bisa hidup di tengah kota meski khawatir kalau rumah rusak," ulasnya.

Bagi warisan

Rumah yang menjadi bagian keluarga Suwarti ini sejarahnya milik Wasikem (64), ibunya yang sudah membangun dengan susah payah sejak puluhan tahun silam. Rumah Wasikem yang berada di perkampungan padat penduduk di sepanjang sungai Code ini dibeli oleh mendiang suaminya yang bekerja sebagai tukang becak dengan luas 80 meter persegi.

"Saya membaginya ke empat anak saya biar adil. Empat-empetan (desak-desakan) tapi mamunya ya begini," ujar Wasikem.

Jika dibayangkan rumah yang ditinggali empat kepala keluarga (KG) ini layak, tentu tidak. Pasalnya, hanya ada satu kamar mandi untuk keperluan mandi cuci kakus (MCK) yang dipergunakan sekitar 13 anggota keluarga. Pencahayaan di rumah tersebut juga ala kadarnya dan aroma pengap menyergap seketika tamu masuk ke dalam rumah.

Tahun 2010 lalu, rumah Wasikem termasuk yang mendapat bantuan rehabilitasi. Namun, anggaran rehabilitasi terbatas itu tak mampu menyembunyikan keretakan pada beberapa bagian rumah tersebut.

Banyak penghuni

Lain lagi cerita dari Marsudiono warga Keparakan Lor, Mergangsan, yang

bertahan hidup bersama delapan anggota keluarganya di rumah berukuran 2,5 x 6 meter persegi. Rumah yang kecil ini penuh sesak dengan beragam perabotan rumah tangga.

Rumah tersebut disekat menjadi kamar, dapur dengan dua kamar di bagian atas. Di bagian atas yang disekat dengan triplek dan berlantai kayu bantuan dari program PNM tahun 2013, ditinggali oleh enam anggota keluarga. Sementara di bagian bawah ditinggali oleh Marsudiono dengan istri dan satu cucunya.

"Rumah saya memang pengap dan kecil sekali, tapi kalau mau mengontrak anak saya kasih harus mengeluarkan uang lebih," ujar Marsudiono yang berprofesi sebagai sales roti keliling ini.

Rasakan bantuan

Sementara itu, bantuan rehabilitasi pemerintah kota setempat cukup dirasakan oleh Suwarjijem (50), warga RW VIII, RT 33, Keparakan Lor. Di rumahnya yang berukuran 7 x 7 meter persegi, Suwarjijem tak lagi merasakan dinginya udara luar di waktu malam atau atap yang bocor karena hujan deras.

Sebelum mendapatkan bantuan dari dana rehabilitasi RTLH sebesar Rp15 juta, rumah Suwarjijem berdingin semi permanen. Untuk sekat per kamarnya menggunakan triplek dan lantai-nya masih plester dan tanah.

Sebelum direhabilitasi, sejumlah anggota keluarganya bertahan tidur di lantai. Atap bocor dan dinginya malam menjadi teman sehari-hari. Pencahayaan di rumah tersebut juga sangat kurang sehingga sangat lembab dan kurang sehat.

"Bantuan ini kami belikan material dan keramik. Awalnya kami mengajukan bantuan ke RT dan RW kemudian ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPWK)," katanya.

Persoalan lama

Ketua LKPM Kecamatan

Mergangsan, H Jangkung Yuwono menjelaskan, persoalan rumah tak layak huni sudah lama terjadi di kawasan Kecamatan Mergangsan. Diakutinya, angka RTLH di kawasan Mergangsan termasuk cukup tinggi.

Merumut pada sejarahnya, lahirnya permukiman padat penduduk di dekat sungai Code ini tak lain karena penjualan tanah sawah oleh rukun kampung (RK) atau setingkat rukun warga (RW) pada saat itu. Kebutuhan tanah di kawasan perkotaan termasuk cukup tinggi.

"Saat itu sekitar tahun 1974, banyak peminat tanah yang membuat pengurusan RK bingung untuk membaginya. Akhirnya, dikavling menjadi kecil-kecil hasanya," urai Jangkung yang juga menjabat sebagai ketua RW VIII Keparakan ini.

Pada saat itu, pembeli tanah bekas sawah ini pun berasal dari tukang becak, buruh dan juga tenaga kasar. Pada akhirnya, berkembang menjadi permukiman padat penduduk dan sebagian besar rumahnya memang kurang layak untuk tempat tinggal.

Dianggap beres

Bangunan rumah di kawasan tersebut, pada awalnya pun hanya berupa rumah dengan dinding semi permanen. Pada tahun 1992an, bantuan pemerintah sudah mulai masuk untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan nominal awal saat itu hanya Rp3 juta per orang.

Kriteria RTLH pun hampir sama persyaratannya, seperti belum bertembok, berlantai, pencahayaan kurang, jumlah penghuni tidak sesuai dengan luasan bangunan. Ada puluhan rumah yang sudah mendapatkan rehabilitasi dari berbagai program dana pemerintah.

Menurut Jangkung, pada akhir tahun ini, di kawasan Keparakan sudah dianggap tidak ada lagi RTLH. Maka, bantuan bergeser ke kampung lain. (als)

Tanah Tanpa Sertifikat

BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta menyebutkan hingga tahun 2018 ini terdapat 2.195 rumah tak layak huni (RTLH) di Kota Yogya. Jumlah tersebut diklaim sudah menurun dari tahun ke tahun. Namun, kendala lain dalam pengurangan RTLH adalah persoalan alas hak bangunan.

Data yang dihimpun Tribun Jogja, jumlah RTLH dari pendataan pada 2014 mencapai 3.304 unit, jumlah tersebut menurun menjadi 2.999 unit pada 2015. Kemudian, pada 2016 menurun menjadi 2.772 unit. Jumlah tersebut menurun lagi menjadi 2.456 unit di 2017. Hingga saat ini terdapat 2.195 unit RTLH yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot setempat.

"Kami sudah berupaya mengintervensi angka RTLH dengan merehab sebanyak 1.440 unit," ujar Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad kepada *Tribun Jogja*, pekan lalu.

Menurutnya, data RTLH ini belum diklasifikasikan sesuai dengan alas haknya. Namun, pihaknya mengaku sudah memiliki peta geospasial sehingga mengetahui titik-titik koordinat rumah tidak layak huni di wilayah ini.

Adapun kriteria RTLH ini di antaranya pencahayaan kurang, lantai yang tidak sehat, dinding non permanen, atap rumah yang juga tidak aman memakai genting tipis, hingga persoalan kebutuhan ruang untuk orang yang tinggal di dalamnya.

"Sesuai standarnya satu orang harus tinggal di ukuran 8 meter persegi. Namun, kenyataannya di kota banyak

rumah kecil yang dihuni banyak orang dan tidak standar," paparnya.

Banyaknya permukiman padat penduduk dan RTLH didominasi di kawasan bantaran sungai di wilayah Yogyakarta. Akan tetapi, Pemkot setempat tidak bisa berbuat banyak jika RTLH berada di kawasan yang tidak sesuai dengan tata ruang, misalnya di daerah wedi kengser.

Menumpang

Edy menyebut permasalahan yang menjadi kendala dalam rehabilitasi RTLH adalah alas hak rumah. Banyak warga yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang tidak memiliki legalitas seperti sertifikat. Kemudian, beberapa warga pun hanya tinggal mengindung atau menyewa rumah dari beberapa orang. Sementara, pemilik rumah tidak mau rumahnya direhab.

"Persoalan alas hak inilah yang menjadi kendala dalam penanganan RTLH di Kota Yogya," Urainya.

Sementara itu, untuk pendanaan rehabilitasi RTLH ini berasal dari pos anggaran APBN, APBD provinsi dan kota, serta CSR pihak swasta (BPD DIY dan Bank Jogja). Khusus untuk Bank Jogja saat ini telah merehab enam rumah khusus untuk penderita tuberculosis (TBC).

"Persoalannya banyak penderita TB yang rumahnya tidak mendukung untuk penyembuhan penyakitnya," ujarnya.

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Yunita Rahmi Hapsari menyebutkan target rehabilitasi RTLH per tahunnya

mencapai 500 unit. Kendati demikian, target tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Anggaran

Dia menjelaskan, sesuai data, alokasi anggaran melalui APBD Kota Yogyakarta untuk penanganan RTLH rata-rata 100 unit per tahun dengan anggaran sebesar Rp12 juta per orang. Untuk anggaran dari APBN Rp15 juta per orang dengan total unit sebanyak 200. Untuk provinsi, pihaknya tidak mengetahui angka pastinya.

"Tahun lalu banyak yang didrop penerima bantuannya dari provinsi. Jumlahnya kurang hafal," ujarnya.

Adapun untuk anggaran rehab ini pun pihaknya melakukan survei terlebih dahulu dengan menerima laporan dari tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang memverifikasi permohonan warga. Untuk dana dari APBN pun ada anggaran kerusakan ringan, sedang dan berat.

Untuk anggaran kerusakan ringan mencapai Rp7,5 juta, kerusakan sedang anggarannya Rp10 juta dan rusak berat sebesar Rp15 juta. Kerusakan yang berhasil diverifikasi di antaranya struktur bangunan seperti atap, dinding, dan pondasi.

Adapun untuk dana dari APBN bisa berupa bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bisa Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk DAK, dana ini masuk ke rekening daerah dan pihaknya sebagai pelaksanaanya.

Bantuan ini, kata dia, tidak diterimakan dalam bentuk tunai. Ada skema pembayaran yang dilaksanakan dengan penerima membentuk kelompok (als)

Problem Kemiskinan di Balik Etalase Kota



KEMISKINAN selalu menjadi problem serius masyarakat perkotaan. Di balik etalase perkotaan yang dipenuhi dengan keelokan taman di siang hari serta ribuan watt lampu di malam hari, selalu saja ada masalah kumuh dan miskin.

Dan potret kemiskinan di perkotaan ini tak hanya terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya macam Surabaya maupun Medan. Kota Yogyakarta yang terus berbenah dan bersolek ini juga menyimpan permasalahan serupa.

Geliat perubahan wajah Malioboro yang semakin manis juga menyimpan persoalan di baliknya. Dari data yang ada, sedikitnya 2.195 rumah tak layak huni merepresentasikan permasalahan kemiskinan sekaligus kekumuhan di kota pelajar ini.

Dari data tersebut, rata-rata keberadaan rumah tak layak huni ini ada di sepanjang bantaran sungai Code. Selain tak layak huni, rumah yang rata-rata ditempati oleh pekerja kasar ini juga hampir seluruhnya ditinggali oleh banyak jiwa yang terdiri dari sejumlah kepala keluarga.

Gambaran sederhananya, sejumlah rumah tak layak huni ini kondisinya sangat memprihatinkan. Ada Sebuah rumah berukuran 3x6 meter yang harus ditempati oleh lima orang. Untuk tidur, mereka harus menyulap kamar tamu tanpa kursi di malam hari. Atau sebaliknya, saat ada tamu, mereka harus melipat tikar yang biasanya untuk tidur.

Bisa dibayangkan bagaimana rumah dengan ukuran begitu sempit tersebut harus dibagi. Sejumlah permasalahan tambahan tentu rentan muncul dalam kondisi sosial seperti ini.

Lalu apakah pemerintah Kota Yogyakarta diam berpangku tangan? Tidak. Sejumlah program terus dilakukan untuk mengubah kondisi tersebut. Dengan skema APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan juga CSR dari pihak swasta, pemerintah terus berupaya mengubah situasi ini.

Data 2.195 rumah tak layak huni tahun ini sudah banyak berkurang dibanding 2014 yang mencapai 3.304 unit. Jumlah tersebut pada 2015 kembali susut menjadi 2.999 unit dan pada 2016 tercatat 2.772 unit, 2017 2.456 unit. Total ada 1.440 unit yang telah direhab oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

Adanya dana dari pusat hingga CSR yang bisa digunakan untuk program ini tak serta merta membuat masalah keberadaan rumah tak layak huni ini bisa cepat diselesaikan. Setidaknya ada tiga masalah yang mengakibatkan rumah tak layak huni ini akan selalu menjadi problem.

Pertama, banyak rumah tak layak huni ini berdiri di pe-tak tanah yang tak bersertifikat. Sedangkan skema pendanaan dari APBN mewajibkan rumah yang direhab wajib bersertifikat. Kedua, sejumlah rumah tak layak huni ini bukan milik orang yang menempatinya. Rumah tersebut sengaja disewakan oleh pemiliknya dan mereka enggan merehab.

Masalah ketiga adalah masalah pertumbuhan penduduk. Keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni ini secara alamiah akan melahirkan keluarga-keluarga baru. Sementara mereka tak mampu membeli lahan sehingga rumah mereka akan semakin sempit dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga sebagai bilangan pembagi. (***)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Mergangsan			
3. Kelurahan Keparakan			
4. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005